

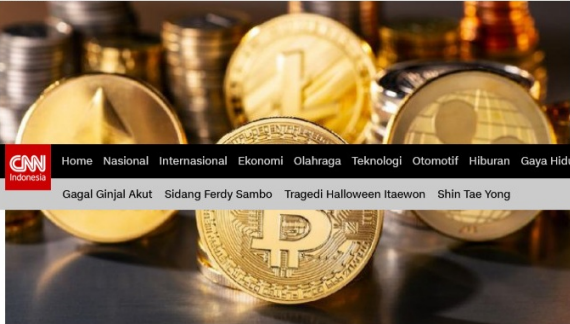
	News Title : Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK	
	Media Name : CNNIndonesia.com	Journalist : skt/bir
	Publish Date : 02 November 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Home
>
Ekonomi
>
Bisnis

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK

CNN Indonesia

Rabu, 02 Nov 2022 13:12 WIB



CNN Indonesia

Home
Nasional
Internasional
Ekonomi
Olahraga
Teknologi
Otomotif
Hiburan
Gaya Hidup

Gagal Ginjal Akut
Sidang Ferdy Sambo
Tragedi Halloween Itaewon
Shin Tae Yong

Bappebti mendukung peralihan pengaturan kripto ke OJK, sepanjang aset kripto dianggap sebagai komoditas, bukan mata uang. (iStockphoto).

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) merespons wacana **kripto** yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Lihat Juga :

Alasan Uang Rp20 Ribu yang Viral di India Ditarik oleh BI

Pit Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku mendukung keputusan pemerintah nantinya. Dengan catatan, kripto tetap sebagai komoditas bukan mata uang.

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).



Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mencoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Lihat Juga :

Harga Kripto Menguat, Dogecoin Naik Peringkat Susul Ethereum

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

Lihat Juga :

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.